

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Yessica Mega Putri^{1*}, Liu Shuyuan²

^{1,2} Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*E-mail: 410976338@student.esaunggul.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 20-07-2026

Revision: 20-08-2026

Published: 23-08-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.741

ABSTRAK

Variasi penghindaran pajak yang signifikan antarperusahaan dalam satu sektor industri berkontribusi pada kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak korporasi Indonesia, namun faktor penjelasnya belum dipahami secara memadai pada sektor barang konsumsi primer. Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan CSR dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, pada 21 perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* BEI periode 2020–2025, menggunakan *Moderated Regression Analysis* hierarkikal berbasis *Fixed Effect Model* terhadap 126 observasi panel. Baik pengungkapan CSR maupun koneksi politik tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan peran moderasi profitabilitas atas kedua jalur pengaruh tersebut juga tidak terkonfirmasi secara statistik; profitabilitas itu sendiri justru konsisten menjadi satu-satunya prediktor signifikan di seluruh spesifikasi model, menggantikan ukuran perusahaan dan leverage yang kehilangan signifikansinya setelah heterogenitas antarperusahaan dikontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa determinan penghindaran pajak pada sektor consumer-driven lebih ditentukan oleh kapasitas finansial perusahaan dibanding oleh legitimasi sosial, akses kekuasaan politik, atau karakteristik struktural generik, dan mengisyaratkan perlunya kerangka penjas alternatif bagi sistem pengawasan pajak berbasis profil risiko perusahaan.

Kata Kunci: Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Pengungkapan CSR; Profitabilitas; Sektor Barang Konsumsi Primer

ABSTRACT

Significant variations in tax avoidance among companies within the same industry sector contribute to the gap between potential and realized corporate tax revenue in Indonesia; however, the explanatory factors behind this remain inadequately understood in the primary consumer goods sector. This study examines the impact of CSR disclosure and political connections on tax avoidance—with profitability as a moderating variable—across 21 "Consumer Non-Cyclicals" companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2025 period. The analysis employs hierarchical Moderated Regression Analysis based on a Fixed-Effects Model using 126 panel observations. Neither CSR disclosure nor political connections were found to have a significant effect on tax avoidance, nor was the moderating role of profitability on these relationships statistically confirmed; instead, profitability consistently emerged as

Acknowledgment

the sole significant predictor across all model specifications, displacing firm size and leverage, which lost their significance once inter-firm heterogeneity was controlled for. These findings indicate that the determinants of tax avoidance in the consumer-driven sector are driven more by a company's financial capacity than by social legitimacy, access to political power, or generic structural characteristics, suggesting a need for alternative explanatory frameworks for tax oversight systems based on corporate risk profiles.

Keywords: *Political Connections; Tax Avoidance; CSR Disclosure; Profitability; Primary Consumer Goods Sector*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun kapasitas fiskal Indonesia masih tergolong rendah secara struktural. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 hanya mencapai 10,08%, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 33,9% (OECD, 2024), dan disertai defisit penerimaan sebesar Rp56,5 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2025). Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya administrasi perpajakan, melainkan juga bersumber dari praktik penghindaran pajak korporasi yang bersifat sistemik (Nugroho et al., 2024, Sholihah & Rahmiati, 2024).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ambiguitas dalam perundang-undangan perpajakan tanpa melanggar ketentuan formal (Ariefiara, 2023). Meskipun sah secara prosedur, praktik ini beroperasi dalam zona abu-abu yang bertentangan dengan semangat regulasi, sehingga merugikan basis penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan fiskal antarpelaku usaha (Hapsari et al., 2023, hal. 1, Manihuruk & Novita, 2023). Dari perspektif perusahaan, penghindaran pajak yang berlebihan membawa risiko reputasi, tekanan dari pemangku kepentingan, dan potensi sanksi otoritas pajak (Ariefiara, 2023). Penghindaran pajak dengan demikian bukan sekadar kalkulasi fiskal, melainkan keputusan strategis yang melibatkan pertimbangan legitimasi, tata kelola, dan regulasi secara terpadu (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Variasi penghindaran pajak tersebut terdokumentasi langsung pada data panel penelitian ini. Berdasarkan 126 observasi perusahaan sektor barang konsumsi primer (*Consumer Non-Cyclicals*) yang terdaftar di BEI periode 2020–2025, *Current Effective Tax Rate* (Current ETR) berkisar antara 0,000 untuk emiten berkode AISA pada tahun 2022 hingga 0,418 untuk emiten berkode BUDI pada tahun 2024 (rata-rata 0,195, standar deviasi 0,126). Rentang ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang membayar pajak kini jauh di bawah tarif PPh Badan normatif sebesar 22%, bahkan mendekati nol, sekaligus perusahaan lain yang membayar mendekati dua kali tarif tersebut. Kondisi ini kemungkinan

disebabkan oleh koreksi fiskal positif atas beban yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*) sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Definisi Current ETR yang digunakan dalam penelitian ini hanya menangkap beban pajak kini, bukan pajak tangguhan (Hanlon & Heitzman, 2010). Pola variasi ETR yang lebar ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2024) pada 36 perusahaan sektor yang sama periode 2017–2021 dan Sipayung et al. (2023), yang keduanya mendokumentasikan kesenjangan ETR sektoral yang signifikan pada *Consumer Non-Cyclicals* BEI. Kondisi ini relevan secara struktural mengingat sektor barang konsumsi primer didominasi oleh perusahaan berskala besar dengan jaringan pemangku kepentingan yang luas.

Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama untuk menjelaskan variasi penghindaran pajak tersebut: pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan koneksi politik. Di satu sisi, *legitimacy theory* yang dikemukakan Dowling & Pfeffer, (1975) memprediksi bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR secara luas akan terdorong berperilaku konsisten dalam kepatuhan pajak guna menghindari *legitimacy deficit* (Jiang et al., 2022). Bukti empiris mendukung hubungan negatif antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak (Ding et al., 2022, Rashid et al., 2024, Susanto & Veronica, 2022). Di sisi lain, *political resource theory* memprediksi bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik memperoleh akses asimetris terhadap informasi regulasi (Faccio et al., 2006, Kim & Zhang, 2016) dan perlakuan preferensial yang memfasilitasi penghindaran pajak (Alfiyah et al., 2022a, Firmansyah et al., 2022, Rudyanto et al., 2023). Kedua pengaruh ini diduga dikondisikan oleh profitabilitas perusahaan. Sejalan dengan *agency theory* yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki insentif sekaligus kapasitas yang lebih besar untuk mengoptimalkan strategi pajaknya (Athira & Ramesh, 2023, Nugroho et al., 2024). Pengujian peran moderasi profitabilitas atas kedua jalur pengaruh tersebut secara simultan masih jarang dilakukan dalam konteks sektor barang konsumsi Indonesia, dan inilah *research gap* sekaligus *novelty* dari penelitian ini.

Tabel 1. Ilustrasi Pola Kontradiktif CSR, Koneksi Politik, dan Current ETR

EMITEN	TAHUN	CSR	PC	SIZE	LEV	PRF	CURRENT ETR
ANJT	2022	0,821	0	29,948	0,277	0,034	0,400
ANJT	2023	0,838	0	29,650	0,385	0,011	0,418
ANJT	2024	0,855	0	29,658	0,386	0,008	0,000
JPFA	2022	0,786	1	31,118	0,582	0,043	0,329
JPFA	2023	0,821	1	31,161	0,584	0,027	0,322
JPFA	2024	0,821	0	31,177	0,522	0,087	0,169
UNVR	2022	0,846	1	30,539	0,782	0,293	0,236
UNVR	2023	0,863	1	30,444	0,797	0,288	0,223
UNVR	2024	0,880	1	30,406	0,866	0,210	0,229

Sumber: data diolah (2026)

Tabel 1 menyajikan pola kontradiktif pada tiga emiten untuk periode tahun yang sama (2022–2024). Pertama, ANJT menunjukkan CSR yang terus meningkat dari 0,821 (2022) menjadi 0,855 (2024) sementara PC tetap 0 sepanjang tiga tahun tersebut, namun Current ETR-nya justru menurun tajam dari 0,400 menjadi 0,000, sebuah pola yang bertolak belakang dengan *legitimacy theory* yang memprediksi hubungan negatif antara CSR dan penghindaran pajak (CSR naik seharusnya diikuti ETR naik). PC tidak berubah pada periode ini, oleh karena itu penurunan ETR tersebut tidak dapat dijelaskan oleh koneksi politik, memperkuat bahwa CSR sendiri gagal menjelaskan pola tersebut. Kedua, JPFA berkoneksi politik (PC = 1) pada 2022–2023 dengan ETR yang justru tinggi (0,329 dan 0,322), namun ketika koneksi politiknya tidak lagi teridentifikasi (PC = 0) pada 2024, ETR-nya turun menjadi 0,169, arah yang berlawanan dengan prediksi *political resource theory* bahwa koneksi politik semestinya menurunkan ETR. Ketiga, UNVR mencatatkan CSR yang terus meningkat dari 0,846 menjadi 0,880 dan koneksi politik yang konsisten (PC = 1) sepanjang 2022–2024, namun Current ETR-nya relatif stabil pada kisaran 0,223–0,236, tidak menunjukkan penurunan yang diprediksi oleh kedua teori sekaligus. Ketiga pola ini menegaskan bahwa hubungan CSR, koneksi politik, dan penghindaran pajak pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* tidak dapat diasumsikan berjalan searah dengan prediksi teori secara otomatis, sehingga pengujian empiris sistematis, sebagaimana dilakukan penelitian ini, menjadi relevan untuk memverifikasi pola mana yang berlaku secara konsisten pada tingkat populasi sampel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya menjawab empat pertanyaan penelitian yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini menguji apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi primer BEI. Kedua, penelitian ini menguji apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang sama. Ketiga, penelitian ini menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Keempat, penelitian ini menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Keempat pertanyaan ini mencerminkan keterhubungan antara tekanan legitimasi, akses kekuasaan, dan kapasitas finansial sebagai tiga jalur yang secara teoretis memengaruhi keputusan pajak korporasi.

Penelitian ini bertujuan menjawab keempat pertanyaan tersebut secara empiris pada perusahaan sektor barang konsumsi primer BEI periode 2020–2025. Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi *legitimacy theory*, *political resource theory*, dan *agency theory* dalam satu model moderasi terpadu. Lebih jauh, pengujian ketiga jalur secara simultan diarahkan untuk menimbang faktor yang benar-benar menggerakkan variasi penghindaran pajak pada sektor *consumer-driven*, dengan menempatkan kapasitas finansial perusahaan sebagai kandidat determinan utama yang selama ini kerap terabaikan di balik penekanan pada legitimasi sosial dan koneksi politik. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi profil perusahaan berisiko tinggi, memberikan pertimbangan bagi investor dalam menilai konsistensi antara komitmen

sosial dan kepatuhan pajak perusahaan, serta menjadi masukan bagi regulator bursa dalam menyusun pedoman pengungkapan CSR yang lebih terintegrasi dengan kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder panel yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor barang konsumsi primer (*Consumer Non-Cyclicals*) yang terdaftar di BEI periode 2020–2025. Data diperoleh dari situs BEI (idx.co.id), situs resmi masing-masing perusahaan, dan portal OJK.

Populasi penelitian merupakan seluruh perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI sebanyak 132 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus pada populasi sasaran yang ditentukan berdasarkan tiga kriteria telah tercatat di BEI paling lambat tahun 2018, yakni minimal dua tahun sebelum awal periode penelitian, untuk menjamin ketersediaan data historis yang memadai bagi analisis panel, memiliki laporan keuangan tahunan lengkap periode 2020–2025, sehingga perusahaan yang delisting atau suspensi akibat gagal lapor dikeluarkan dari sampel, dan menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten sepanjang 2020–2025 sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, sehingga perusahaan yang tidak lengkap pada salah satu tahun sekalipun dikeluarkan dari sampel. Kriteria ketiga ini sekaligus menjadi basis ketersediaan data skoring CSR (117-item GRI Standards 2021) secara utuh untuk seluruh periode penelitian. Ketersediaan laporan keberlanjutan untuk kriteria ketiga diverifikasi melalui penelusuran langsung pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web resmi masing-masing emiten.

Perusahaan yang dokumennya tidak ditemukan pada kedua sumber tersebut hingga batas waktu pengumpulan data (Juni 2026) dinyatakan tidak menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun bersangkutan. Kriteria laba positif tidak diterapkan sebagai penyaring sampel, karena penghindaran pajak justru dapat termanifestasi melalui rekayasa laba mendekati nol atau negatif. Observasi dengan laba rendah maupun negatif tetap diikutsertakan dan interpretasi Current ETR pada observasi tersebut dilakukan secara hati-hati pada tahap analisis. Profil dewan direksi dan komisaris diverifikasi dari laporan tahunan atau portal OJK untuk keperluan identifikasi koneksi politik. Seluruh perusahaan yang memenuhi ketiga kriteria tersebut diikutsertakan tanpa penyaringan lebih lanjut. Proses seleksi sampel disajikan pada Tabel 2.

Ukuran sampel sebanyak 126 observasi ($21 \text{ perusahaan} \times 6 \text{ tahun}$) dinilai memadai untuk estimasi MRA dengan 7 prediktor, termasuk 2 variabel interaksi. Mengacu pada Hair et al. (2019), rasio minimum observasi per prediktor sebesar 10:1 terpenuhi dengan rasio aktual 18:1 ($126/7$). Baltagi, (2021) menegaskan bahwa dalam data panel, dimensi waktu ($T = 6$) berkontribusi pada kecukupan derajat kebebasan, didukung pula oleh jumlah cross-section ($N = 21$) yang relatif memadai untuk analisis panel

pada sektor spesifik.

Penerapan kriteria ketiga secara inheren menghasilkan sampel yang bias ke perusahaan dengan tingkat transparansi dan tata kelola di atas rata-rata populasi sektor. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan generalisabilitas temuan, sebagaimana juga diakui Zahriyah & Parmono (2021) bahwa sampel yang diseleksi berdasarkan ketersediaan data berpotensi menghasilkan estimasi yang tidak merepresentasikan populasi yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Hipotesis

H1: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H3: Profitabilitas memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak

H4: Profitabilitas memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Current ETR	126	0,000	0,418	0,195	0,126
CSR	126	0,368	0,897	0,695	0,119
PC	126	0	1	0,140	0,351
PRF	126	-0,052	0,300	0,069	0,084
SIZE	126	27,991	32,158	29,921	1,112
LEV	126	0,000	1,003	0,467	0,218

Sumber: Output EViews (2026)

Nilai rata-rata ETR sebesar 0,195 yang secara nominal berada di bawah tarif PPh Badan normatif 22% mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang moderat pada sektor ini secara agregat. Gambaran tersebut menjadi jauh lebih kompleks ketika dispersi data diperhatikan. Rentang ETR dari 0,000 hingga 0,418 mengungkap adanya polarisasi perilaku pajak yang tajam dalam satu sektor yang sama: sebagian perusahaan hampir tidak membayar pajak efektif sama sekali, sementara perusahaan lain membayar mendekati dua kali lipat tarif nominal. Kondisi ini secara langsung merespons pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni faktor apa yang mendorong variasi ETR yang sedemikian lebar dalam satu sektor dengan rezim regulasi yang seragam. Rata-rata pengungkapan CSR sebesar 0,695 berarti perusahaan sampel rata-rata mengungkapkan sekitar 81 dari 117 item GRI Standards 2021, mencerminkan intensitas tekanan legitimasi yang tinggi dari konsumen dan publik pada sektor barang konsumsi ini. Fakta bahwa hanya 14% observasi yang mencatat koneksi politik aktif

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* beroperasi tanpa proteksi politik formal, kondisi yang justru membuat temuan signifikansi variabel ini pada tahap pengujian berikutnya menjadi semakin informatif secara substantif.

Pola ETR yang rata-rata berada di bawah tarif nominal namun dengan dispersi tinggi dapat dipahami melalui dua mekanisme teoretis yang bekerja secara berlawanan. Di satu sisi, tekanan dari pemangku kepentingan eksternal pada perusahaan besar yang visibel secara publik mendorong mereka untuk tidak terlalu agresif dalam penghindaran pajak, guna meminimalkan risiko sorotan regulator dan media, sehingga ETR sebagian perusahaan tetap bertahan mendekati tarif nominal (Ariefiara, 2023, Suchman, 1995). Di sisi lain, *agency theory* memprediksi bahwa manajer perusahaan dengan profitabilitas tinggi tetap memiliki insentif kuat untuk mengoptimalkan beban pajak demi memaksimalkan laba bersih bagi pemegang saham, sehingga menekan rata-rata ETR sampel secara keseluruhan hingga berada di bawah tarif nominal sekaligus memperlebar dispersi ke bawah pada distribusi ETR (Jensen & Meckling, 1976). Tingginya rata-rata CSR sejalan dengan prediksi *legitimacy theory* bahwa perusahaan yang langsung berhadapan dengan konsumen akhir akan secara strategis meningkatkan pengungkapan sosial sebagai instrumen manajemen legitimasi (Suchman, 1995). Profitabilitas yang sangat bervariasi, dengan koefisien variasi mencapai 121,7% meskipun telah diwinsorisasi pada persentil 5%-95%, mencerminkan heterogenitas kapasitas finansial antarperusahaan yang secara teoretis memiliki implikasi berbeda terhadap insentif dan kapasitas penghindaran pajak.

Perbandingan antarvariabel mengungkap tiga pola yang memiliki implikasi penting bagi pengujian hipotesis. Pertama, tingginya rata-rata CSR yang berdampingan dengan rata-rata ETR yang berada di bawah tarif nominal secara deskriptif belum memberikan sinyal kuat adanya hubungan negatif antara keduanya, karena perusahaan dengan CSR tinggi sekalipun tampak memiliki ETR di kisaran tarif normal hingga sedikit di bawahnya. Kedua, kelangkaan koneksi politik dalam sampel menjadikan variabel ini secara statistik terbatas dalam kekuatan pengujian, namun justru membuat efeknya lebih bermakna secara substantif apabila terbukti signifikan. Ketiga, perusahaan besar dalam sektor ini cenderung lebih leveraged sebagaimana tercermin dari korelasi positif antara SIZE dan LEV dalam sampel, sehingga pengendalian kedua variabel ini secara simultan menjadi penting agar efek murni CSR dan koneksi politik dapat diisolasi dengan tepat.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik pada *Fixed Effect Model* terpilih untuk memastikan validitas inferensi estimasi. Pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tetap diterapkan sebagai prosedur baku pemeriksaan kualitas estimasi panel sebelum penerapan pembobotan *cross-section* dan *White diagonal* standard errors pada model

akhir. Tabel 5 menyajikan ringkasan hasil keempat pengujian tersebut, dengan rincian dan implikasinya dibahas pada paragraf berikut.

Tabel 2. Ringkasan Pengujian

Jenis Uji	Statistik Uji	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (Jarque-Bera)	JB Statistic, Probability	JB = 4,019, Prob. = 0,134	Prob. > 0,05	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	Tolerance dan VIF (regresi bantu, Model 3, lihat Tabel 6)	VIF maks. = 3,747 (PC_PRF_W), Tolerance min. = 0,267 (PC_PRF_W)	VIF < 10, Tolerance > 0,1	Tidak terjadi multikolinearitas yang esensial
Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	Prob(F-statistic) regresi residual terstandarisasi	Prob(F-statistic) = 0,184, seluruh variabel independen Sig. > 0,05	Prob. > 0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Autokorelasi	Durbin-Watson (lihat Tabel 6)	DW = 1,801 (dL = 1,591, dU = 1,810, n = 126, k = 7, interpolasi Savin & White, 1977)	dU < DW < 4-dU (ideal)	DW mendekati dU, tidak terindikasi autokorelasi positif yang kuat

Sumber: Output EViews (2026)

Uji normalitas residual menggunakan uji Jarque-Bera menghasilkan nilai statistik JB = 4,019 dengan Probability sebesar 0,134 ($p > 0,05$), sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Hasil ini memiliki implikasi penting bagi keandalan inferensi model: estimasi *Fixed Effect Model* dapat diandalkan untuk uji-t pada koefisien dan uji-F pada kelayakan model. Temuan yang lebih menarik secara analitis adalah residual tetap berdistribusi normal meskipun sampel mencakup perusahaan dengan profil yang sangat kontras, mulai dari perusahaan dengan ETR tinggi dan CSR rendah hingga perusahaan dengan CSR sangat tinggi dan ETR stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa spesifikasi model mampu menangkap struktur variasi data dengan baik tanpa menghasilkan residual yang secara sistematis menyimpang dari distribusi normal.

Uji multikolinearitas pada Model 3 menunjukkan seluruh variabel memiliki VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1, dengan nilai tertinggi pada variabel interaksi PC_PRF_W (VIF = 3,747) dan CSR_PRF_W (VIF = 3,012), sementara variabel kontrol SIZE (VIF = 1,318) dan LEV (VIF = 1,451) menunjukkan kolinearitas yang jauh lebih rendah. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa prosedur *mean-centering* yang diterapkan sebelum pembentukan variabel interaksi berhasil mereduksi multikolinearitas non-esensial secara efektif sesuai rekomendasi Aiken & West (1991). Implikasinya, koefisien regresi seluruh variabel dapat diinterpretasikan secara independen tanpa kekhawatiran bahwa estimasi

satu variabel terdistorsi oleh korelasi berlebihan dengan variabel lain dalam model.

Deteksi awal pada *Fixed Effect Model* tanpa pembobotan menunjukkan indikasi heteroskedastisitas yang terkait dengan variabel PRF_W_C, sementara variabel lain tidak menunjukkan gejala serupa. Pola ini mengandung makna substantif yang relevan: variasi varians residual yang bergantung pada profitabilitas menunjukkan bahwa perilaku pajak perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih tidak terprediksi dibanding perusahaan dengan profitabilitas yang lebih konservatif. Untuk mengatasi hal ini, estimasi akhir menerapkan *Weighted Least Squares* dengan pembobotan *cross-section* dikombinasikan dengan *White diagonal* standard errors, sehingga uji Glejser pada residual terstandarisasi dari model akhir tidak lagi mendeteksi heteroskedastisitas pada variabel independen mana pun ($\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0,184$, lihat Tabel 5). Penanganan ini konsisten dengan rekomendasi metodologis umum bahwa heteroskedastisitas sebaiknya diatasi melalui estimasi berbobot atau standard error yang robust, bukan sekadar diabaikan (Hair et al., 2019).

Statistik Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,801 pada Model 3, sangat mendekati meskipun sedikit di bawah batas bawah $dU = 1,810$ ($n = 126$, $k = 7$, $\alpha = 5\%$, nilai interpolasi mengikuti tabel Savin & White, 1977), berada pada zona yang secara teknis *inconclusive*. Nilai ini mengandung makna struktural yang penting: perilaku pajak sebuah perusahaan pada suatu tahun cenderung serupa dengan perilakunya pada tahun sebelumnya karena kebijakan perencanaan pajak perusahaan bersifat persisten dalam jangka pendek. Autokorelasi residual yang tersisa tidak menggugurkan konsistensi estimator, namun tetap diakui sebagai keterbatasan metodologis yang inheren pada data panel dengan dimensi waktu terbatas (Zahriyah & Parmono, 2021).

Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) Hierarkikal

Pengujian MRA hierarkikal tiga blok mengikuti prosedur Aiken & West (1991): blok kontrol, blok penambahan variabel utama, dan blok penambahan interaksi, seluruhnya diestimasi dengan *Fixed Effect Model*, pembobotan *cross-section* (*Weighted Least Squares*), dan *White diagonal* standard errors sesuai hasil uji pemilihan model dan uji asumsi klasik pada Bab 3. Ketiga model terbukti layak secara statistik, ditunjukkan oleh F-test keseluruhan yang signifikan pada setiap blok (Model 1: $F = 228,752$, Model 2: $F = 30,890$, Model 3: $F = 17,924$, seluruhnya $p < 0,001$), mengkonfirmasi bahwa setiap spesifikasi model secara kolektif mampu menjelaskan variasi ETR secara bermakna. Tabel 6 menyajikan hasil koefisien beserta ringkasan model (R^2 , ΔR^2 , F-statistic) untuk ketiga tahap.

Tabel 3. Hasil Koefisien dan Ringkasan Model MRA Hierarkikal
(*Fixed Effect Model, Weighted Least Squares*)

Model	Variabel	B	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,203	0,335	0,606	0,546	—	—

Model	Variabel	B	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Tolerance	VIF
	SIZE	-0,000	0,011	-0,033	0,973	0,952	1,050
	LEV	0,006	0,018	0,313	0,755	0,952	1,050
$R^2 = 0,541$, $F = 228,752$ (Prob. < 0,001)							
2	(Constant)	0,560	0,561	1,000	0,320	—	—
	CSR_C	0,017	0,039	0,431	0,667	0,846	1,182
	PC_C	0,006	0,010	0,599	0,550	0,610	1,638
	PRF_W_C	-0,300	0,138	-2,179	0,032	0,896	1,116
	SIZE	-0,012	0,019	-0,657	0,513	0,778	1,285
	LEV	0,003	0,047	0,069	0,945	0,789	1,268
$R^2 = 0,555$, $\Delta R^2 = 0,014$, $F = 30,890$ (Prob. < 0,001)							
3	(Constant)	1,266	0,948	1,335	0,185	—	—
	CSR_C	0,053	0,040	1,316	0,191	0,748	1,337
	PC_C	0,000	0,007	0,019	0,985	0,574	1,743
	PRF_W_C	-0,321	0,121	-2,646	0,010	0,737	1,358
	CSR_PRF_W	1,326	0,816	1,626	0,107	0,332	3,012
	PC_PRF_W	0,248	0,269	0,923	0,359	0,267	3,747
	SIZE	-0,037	0,032	-1,157	0,250	0,759	1,318
	LEV	0,049	0,055	0,906	0,367	0,689	1,451
$R^2 = 0,570$, $\Delta R^2 = 0,015$, $F = 17,924$ (Prob. < 0,001), Durbin-Watson = 1,801							

Keterangan: Dependent Variable: ETR (Current ETR, winsorized). Estimasi *Fixed Effect Model* dengan *cross-section* weights dan *White diagonal* standard errors. Sumber: Output EViews (2026).

Sumber: data diolah (2026)

Model 1 yang hanya memasukkan variabel kontrol, bersama dengan efek tetap perusahaan, menjelaskan 54,1% variasi ETR ($R^2 = 0,541$, $F = 228,752$, $p < 0,001$). Namun, secara individual SIZE ($p = 0,973$) dan LEV ($p = 0,755$) tidak signifikan pada tahap ini, berbeda dari literatur empiris klasik yang mapan mengenai determinan ETR berbasis ukuran perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel kontrol tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ETR dalam sampel penelitian. Penambahan variabel CSR, koneksi politik, dan profitabilitas secara simultan pada Model 2 meningkatkan R^2 menjadi 55,5% ($\Delta R^2 = 0,014$), dengan PRF_W_C muncul sebagai satu-satunya variabel yang signifikan ($p = 0,032$). Penambahan variabel interaksi pada Model 3 meningkatkan R^2 menjadi 57,0% ($\Delta R^2 = 0,015$), dengan PRF_W_C tetap signifikan ($p = 0,010$) sementara CSR_PRF_W ($p = 0,107$) dan PC_PRF_W ($p = 0,359$) tidak signifikan. Pola yang konsisten pada Model 2 dan Model 3 ini menunjukkan bahwa setelah heterogenitas antarperusahaan yang bersifat tetap dikontrol melalui Fixed Effect Model, profitabilitas (PRF_W_C) muncul sebagai determinan struktural yang konsisten signifikan, sementara ukuran perusahaan dan leverage tidak menunjukkan pengaruh langsung yang bermakna secara statistik. Berdasarkan Tabel 6, model regresi akhir untuk masing-masing tahap dapat ditulis sebagai berikut:

Model 1 (kontrol): $ETR = 0,203 - 0,000 \text{ SIZE} + 0,006 \text{ LEV}$

Model 2 (+ variabel utama): $ETR = 0,560 + 0,017 \text{ CSR}_C + 0,006 \text{ PC}_C - 0,300 \text{ PRF}_W_C -$

$$0,012 \text{ SIZE} + 0,003 \text{ LEV}$$

$$\text{Model 3 (+ interaksi): ETR} = 1,266 + 0,053 \text{ CSR_C} + 0,000 \text{ PC_C} - 0,321 \text{ PRF_W_C} + 1,326 \\ \text{CSR_PRF_W} + 0,248 \text{ PC_PRF_W} - 0,037 \text{ SIZE} + 0,049 \text{ LEV}$$

Sebagai ilustrasi, untuk perusahaan dengan karakteristik rata-rata sampel ($\text{SIZE} = 29,921$, $\text{LEV} = 0,467$, $\text{CSR_C} = \text{PC_C} = \text{CSR_PRF_W} = \text{PC_PRF_W} = 0$ setelah *mean-centering*, $\text{PRF_W_C} = 0$), Model 3 memprediksi ETR sebesar $1,266 - 0,037(29,921) + 0,049(0,467) = 0,182$, mendekati Current ETR rata-rata sampel sebesar 0,195 (Tabel 4). Sebaliknya, untuk perusahaan dengan profitabilitas 0,15 di atas rata-rata sampel ($\text{PRF_W_C} = 0,15$), dengan karakteristik lain tetap pada rata-rata, Model 3 memprediksi ETR sebesar $0,182 - 0,321(0,15) = 0,134$, mengonfirmasi arah koefisien PRF_W_C yang negatif: perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung membayar pajak kini secara proporsional lebih rendah terhadap laba sebelum pajak, konsisten dengan prediksi bahwa kapasitas finansial yang lebih besar memberikan ruang lebih luas bagi optimalisasi strategi perpajakan.

Pengujian Hipotesis

Pengungkapan CSR Berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian pada Model 2 menunjukkan koefisien CSR_C sebesar 0,017 dengan signifikansi $p = 0,667$ ($p > 0,05$), sehingga $H1$ ditolak. Pengungkapan CSR tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* BEI periode 2020–2025. Dalam kerangka *legitimacy theory* (Suchman, 1995), hasil ini konsisten dengan argumen bahwa pengungkapan CSR pada sektor ini bersifat *symbolic legitimation* di ranah sosial namun tidak menjalar ke perilaku pajak yang bersifat teknis-finansial. Perusahaan berhasil membangun legitimasi sosial melalui narasi keberlanjutan, namun tekanan legitimasi tersebut belum cukup kuat untuk mengubah keputusan pajak yang pada dasarnya dikendalikan oleh kalkulasi finansial. Dengan kata lain, pemangku kepentingan sektor *Consumer Non-Cyclicals* tampaknya belum secara efektif mengintegrasikan kepatuhan pajak ke dalam penilaian legitimasi perusahaan. Ding et al. (2022) pada perusahaan Tiongkok dan Susanto & Veronica (2022) pada perusahaan BEI multisektoral menemukan hubungan negatif yang signifikan antara CSR dan penghindaran pajak, namun kedua studi tersebut menggunakan sampel multisektoral, berbeda dari fokus sektoral spesifik penelitian ini. Penelitian ini memberikan bukti bahwa efek CSR terhadap perilaku pajak bersifat sektor-spesifik dan lebih lemah pada industri yang secara intrinsik sudah memiliki tekanan legitimasi tinggi dari sisi produk dan pemasaran, sehingga pajak bukan merupakan domain legitimasi yang diprioritaskan oleh perusahaan maupun pemangku kepentingannya.

Koneksi Politik Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian pada Model 2 menunjukkan koefisien PC_C sebesar 0,006 dengan signifikansi $p = 0,550$ ($p > 0,05$), sehingga $H2$ ditolak. *Political resource theory* memprediksi bahwa koneksi politik

memberikan akses asimetris terhadap informasi regulasi dan perlakuan administratif yang menguntungkan, yang secara teoretis semestinya diterjemahkan menjadi ruang penghindaran pajak yang lebih besar dan ETR yang lebih rendah (Faccio et al., 2006). Mekanisme ini bergantung pada premis bahwa akses politik dapat dikonversi menjadi keunggulan pajak melalui kebijakan diskresioner otoritas terkait. Pada sektor *Consumer Non-Cyclicals*, premis ini tampaknya tidak berlaku: sektor barang konsumsi primer beroperasi dalam lingkungan yang relatif lebih *market-driven* dan kurang bergantung pada perlakuan regulasi diskresioner dibanding sektor ekstraktif atau infrastruktur yang menjadi konteks utama *political resource theory* dikembangkan, sehingga akses politik tidak memiliki saluran institusional untuk dikonversi menjadi keunggulan pajak yang signifikan secara statistik. Penjelasan sektoral ini bersifat interpretatif dan disusun setelah mengamati pola hasil, premis mengenai perbedaan ketergantungan regulasi antarsektor belum diuji secara langsung dalam penelitian ini dan memerlukan desain komparatif lintas sektor eksplisit untuk konfirmasi empiris lebih lanjut. Hasil ini tidak mendukung *political resource theory* dalam konteks sektor ini (Faccio et al., 2006, Kim & Zhang, 2016), sekalipun temuan berbeda pernah dilaporkan pada sampel multisektoral BEI oleh Firmansyah et al. (2022) yang kemungkinan mencakup sektor dengan ketergantungan regulasi lebih tinggi. Koneksi politik tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* BEI periode 2020–2025. Pengukuran koneksi politik yang bersifat biner (ada/tidak ada koneksi) tanpa membedakan intensitas atau jenis jabatan berpotensi mengaburkan variasi pengaruh yang sesungguhnya ada dalam sampel.

Profitabilitas Memperlemah Pengaruh Negatif Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian pada Model 3 menunjukkan koefisien interaksi CSR_PRF_W sebesar 1,326 dengan signifikansi $p = 0,107$ ($p > 0,05$), sehingga H3 ditolak. *Agency theory* memprediksi bahwa pada perusahaan berprofitabilitas tinggi, manajemen memiliki sumber daya diskresioner yang lebih besar dan menghadapi tekanan pemegang saham untuk memaksimalkan laba bersih, sehingga insentif untuk memisahkan narasi CSR dari keputusan pajak aktual (*CSR-washing*) secara teoretis semakin besar (Dewi et al., 2022). Mekanisme ini mengasumsikan bahwa CSR terlebih dahulu memiliki pengaruh dasar terhadap penghindaran pajak yang kemudian diperkuat atau diperlemah oleh tingkat profitabilitas. Karena H1 telah menunjukkan bahwa pengaruh langsung CSR terhadap ETR tidak signifikan pada sektor ini, prasyarat teoretis bagi moderasi profitabilitas tersebut tidak terpenuhi: tidak terdapat efek dasar yang dapat diperkuat maupun diperlemah oleh kapasitas finansial perusahaan. Penolakan H3 dengan demikian konsisten secara logis dengan penolakan H1, dan tidak mendukung prediksi *agency theory* mengenai perilaku *CSR-washing* pada perusahaan berprofitabilitas tinggi dalam konteks sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Profitabilitas tidak terbukti memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas Memperkuat Pengaruh Positif Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian pada Model 3 menunjukkan koefisien interaksi PC_PRF_W sebesar 0,248 dengan signifikansi $p = 0,359$ ($p > 0,05$), sehingga H4 ditolak. Dalam kerangka *agency theory*, profitabilitas tinggi diprediksi memperbesar kapasitas manajerial untuk mengeksploitasi koneksi politik secara lebih agresif, karena sumber daya finansial yang lebih besar memungkinkan perusahaan menanggung biaya transaksi dan risiko reputasi yang menyertai pemanfaatan akses politik untuk tujuan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976). Sama seperti H3, mekanisme moderasi ini mensyaratkan adanya efek dasar yang dapat diperkuat oleh profitabilitas. Karena H2 telah menunjukkan bahwa pengaruh langsung koneksi politik terhadap ETR sendiri tidak signifikan ($p = 0,550$) pada sektor ini, secara logis tidak terdapat efek dasar yang dapat diperbesar oleh kapasitas finansial perusahaan, sehingga prediksi *agency theory* bahwa profitabilitas tinggi memperbesar kapasitas eksploitasi koneksi politik tidak terkonfirmasi pada konteks sektor dan sampel penelitian ini. Penolakan H4 dengan demikian konsisten secara logis dengan penolakan H2. Profitabilitas tidak terbukti memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. ΔR^2 Model 3 sebesar 0,015 mengonfirmasi bahwa kontribusi tambahan kedua variabel interaksi terhadap kemampuan prediksi model relatif kecil, baik untuk jalur CSR maupun jalur koneksi politik.

PEMBAHASAN

Temuan utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam satu proposisi: pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* BEI periode 2020–2025, baik pengungkapan CSR maupun koneksi politik tidak terbukti menjadi determinan signifikan penghindaran pajak, dan profitabilitas, yang secara teoretis dipilih sebagai moderator berdasarkan *agency theory* yang telah berpengaruh dalam literatur penghindaran pajak Jensen & Meckling, (1976), tidak berperan sebagai moderator atas kedua jalur pengaruh tersebut pada sektor ini. Sebaliknya, profitabilitas sendiri tampil sebagai satu-satunya prediktor yang konsisten signifikan pada Model 2 dan Model 3 ($p = 0,032$ dan $p = 0,010$), sementara ukuran perusahaan dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan di seluruh spesifikasi model. Pola ini menunjukkan bahwa kapasitas finansial perusahaan, bukan legitimasi sosial, akses kekuasaan politik, maupun karakteristik struktural generik seperti skala aset atau struktur utang, yang paling relevan menjelaskan variasi ETR pada sektor ini.

Mekanisme yang menghubungkan profitabilitas dengan Current ETR pada sektor ini dapat dijelaskan melalui kapasitas dan insentif perencanaan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas pra-pajak lebih tinggi menghadapi basis laba kena pajak yang lebih besar sehingga manfaat marginal dari setiap upaya penghematan pajak menjadi lebih tinggi, sekaligus memiliki sumber daya internal yang lebih memadai untuk membiayai fungsi perpajakan yang kompleks (Jensen & Meckling, 1976, Nugroho et al., 2024). Gupta & Newberry (1997) telah menunjukkan bahwa variasi ETR antarperusahaan secara

sistematis terkait dengan kinerja keuangan, dan pola koefisien PRF_W_C yang negatif dan konsisten dalam penelitian ini memperkuat bahwa kapasitas finansial, bukan sekadar skala aset, yang menggerakkan optimalisasi beban pajak kini. Interpretasi ini tetap bersifat asosiatif mengingat desain *cross-section* penelitian ini, dan pengujian mekanisme mediasi yang lebih eksplisit diperlukan untuk mengonfirmasi jalur kausalnya.

Hasil non-signifikan ini secara metodologis tidak dapat dibaca sebagai kegagalan penelitian, melainkan sebagai bukti *boundary condition* yang membatasi jangkauan *legitimacy theory* dan *political resource theory* pada konteks sektoral tertentu (Whetten, 1989). Ferguson & Heene (2012) menegaskan bahwa hasil non-signifikan yang diperoleh dari desain metodologis yang memadai, meliputi ukuran sampel yang mencukupi, uji asumsi klasik yang terpenuhi, dan spesifikasi model yang tepat, memiliki nilai ilmiah yang setara dengan hasil signifikan, karena keduanya sama-sama menyempurnakan peta batas keberlakuan sebuah teori. Ketidadaan pengaruh CSR dalam penelitian ini sejalan dengan argumen *CSR decoupling* (Velte, 2025), di mana pengungkapan CSR pada laporan keberlanjutan tidak selalu mencerminkan komitmen substantif perusahaan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hubungan keduanya menjadi lemah secara empiris. Interpretasi *boundary condition* ini perlu dibaca berdampingan, bukan menggantikan, penjelasan alternatif yang diuraikan pada bagian Keterbatasan Penelitian, yaitu bahwa daya identifikasi *Fixed Effect Model* terhadap variabel yang relatif tetap antarwaktu, seperti koneksi politik dan skor CSR, turut membatasi kemampuan model mendeteksi pengaruh yang sesungguhnya ada. Kedua penjelasan tersebut sama-sama masuk akal dan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dengan desain penelitian ini, sehingga klaim *boundary condition* pada kedua teori tersebut bersifat tentatif dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui desain yang memiliki daya identifikasi lebih besar terhadap variabel yang *time-invariant*.

Pola non-signifikan ini konsisten dengan bukti empiris Indonesia yang tidak menunjukkan arah tunggal yang stabil. Pada jalur CSR, Maulida & Azahra (2022) menemukan pengaruh negatif signifikan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2018–2020, sedangkan Wulandari & Fanani (2024) justru menemukan pengaruh positif pada perusahaan nonkeuangan BEI, mengindikasikan bahwa efek CSR terhadap penghindaran pajak berpindah arah antarperiode dan antarpengukuran. Pada jalur koneksi politik, Manihuruk & Novita (2023) dan Diningrum et al., (2023) bahkan melaporkan koneksi politik menurunkan penghindaran pajak, berlawanan dengan prediksi *political resource theory* yang mendasari H2. Ketidakstabilan lintas studi ini memperkuat interpretasi bahwa CSR dan koneksi politik bukan determinan struktural penghindaran pajak yang berlaku seragam, melainkan efek yang sangat bergantung pada sektor, periode, dan cara pengukuran, sehingga hasil non-signifikan pada penelitian ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas, bukan anomali sampel.

Ketiadaan pengaruh signifikan dari CSR maupun koneksi politik tetap relevan dibaca dalam konteks fenomena yang diidentifikasi pada latar belakang penelitian, yakni defisit penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp56,5 triliun pada 2024 dan rasio pajak yang hanya 10,08% dari PDB (Kementerian Keuangan RI, 2025, OECD, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa determinan variasi ETR pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* kemungkinan besar bersumber dari kapasitas finansial (profitabilitas) dan faktor lain yang belum tertangkap dalam model ini, bukan dari legitimasi sosial berbasis pengungkapan, relasi kekuasaan politik, maupun karakteristik struktural generik semata. Implikasinya bagi kesenjangan penerimaan pajak nasional, sumber erosi basis pajak pada sektor ini kemungkinan lebih terkait dengan strategi perencanaan pajak yang terhubung dengan kapasitas finansial perusahaan dibandingkan mekanisme berbasis legitimasi atau koneksi yang diuji dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji apakah pengungkapan CSR dan koneksi politik, dengan profitabilitas sebagai moderator, berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* BEI, dan hasilnya menunjukkan bahwa ketiganya tidak terbukti berpengaruh signifikan. Pengungkapan CSR, meskipun rata-rata tinggi dan diukur secara komprehensif berdasarkan standar GRI, tidak memiliki kaitan bermakna dengan perilaku pajak perusahaan, sebuah temuan yang menantang asumsi bahwa tekanan legitimasi sosial dapat mendisiplinkan keputusan fiskal korporasi pada sektor ini.

Koneksi politik juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bertentangan dengan prediksi *political resource theory* bahwa akses politik semestinya memberikan ruang penghindaran pajak yang lebih besar. Profitabilitas juga tidak terbukti memoderasi kedua jalur pengaruh tersebut. Sebaliknya, profitabilitas sendiri konsisten menjadi prediktor signifikan penghindaran pajak di seluruh tahap pengujian, sementara ukuran perusahaan dan *leverage* kehilangan signifikansinya setelah heterogenitas antarperusahaan dikontrol melalui *Fixed Effect Model*. Pola ini menunjukkan bahwa yang paling relevan menjelaskan variasi ETR pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* Indonesia sepanjang periode penelitian adalah kapasitas finansial perusahaan, bukan legitimasi sosial, akses politik, atau karakteristik struktural generik. Secara lebih luas, temuan ini menegaskan bahwa reformasi transparansi berbasis pengungkapan CSR saja tidak cukup untuk mempersempit kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia, dan pengawasan berbasis profil profitabilitas perusahaan tetap diperlukan sebagai pelengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions*. SAGE Publications.
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022a). Is tax avoidance caused by political connection and

- executive characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 32–41. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022b). Is Tax Avoidance Caused By Political Connection and Executive Characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 32–41. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Almutairi, A. M., & Abdelazim, S. I. (2025). The impact of CSR on tax avoidance: The moderating role of political connections. *Sustainability*, 17(1), 195. <https://doi.org/10.3390/su17010195>
- Ariefiara, D. (2023). Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Secara Komprehensif (Issue April). Widina. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/406515-tax-avoidance-latent-variable-score-taxl-c5e513dc.pdf>
- Arwani, A. (2021). *Grand Theory Esensi Ilmu Sosial dan Ekonomi* (S. R. Utari (ed.), 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *International Business Review*, 32(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Deegan, C. (2023). *Financial Accounting Theory*. Cengage Learning.
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR memoderasi hubungan intensitas modal, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Ding, R., Cao, Y., & Sun, Y. (2022). The Effects of Mandatory CSR Disclosure on Tax Avoidance and Tax Incidence. *Frontiers*, 13(May), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.905153>
- Diningrum, N. S., Program, A. S., Maret, U. S., & Java, C. (2023). Political Connection and Tax Avoidance: Evidence From Two-Tier Board System In Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 16(2), 327–336. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.17362>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Jstor*, 18(1), 122–136. <https://www.jstor.org/stable/1388226>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Faccio, M., Masulis, R., & McConnell, J. J. (2006). Political Connections and Corporate Bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.2139/ssrn.676905>
- Ferguson, C. J., & Heene, M. (2012). A Vast Graveyard of Undead Theories: Publication Bias and Psychological Science's Aversion to the Null. *Perspectives on Psychological Science*, 7(6), 555–561. <https://doi.org/10.1177/1745691612459059>

- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Nor, A. M., Qomar, M. N., Labadia, D., & Andriyani, K. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: Does CSR disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI standards. Global Reporting Initiative. <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010a). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010b). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hapsari, D. I., Ratnawati, J., & Pamungkas, I. dapit. (2023). *Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*. Eureka Media Aksara.
- Indarti, M. G. K., Widiatmoko, J., & Badjuri, A. (2024). *Political Connection (Konsep, Model Pengukuran dan Peluang Riset)* (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jiang, W., Zhang, C., & Si, C. (2022). The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance. *Technological Forecasting and Social Change*, 179(121351). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121351>
- Judijanto, L., Siwatiningrum, E., Rahmadani, S., & Jamaludin, H. (2026). *Kekuasaan, otoritas, dan legitimasi: Analisis Politik Kritis* (M. . Mutiara Ahsani (ed.)). CV Lauk Puyu Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Realisasi APBN 2024: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/laporan-keuangan/lkpp>
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lestari, A., Indrawan, I. G. A., & Sasana, L. P. W. (2024). Faktor penghindaran pajak perusahaan consumer non-cyclicals terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 78–90. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9852>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285> Penghindaran

- Maulida, R., & Azahra, W. (2022). The effect of CSR disclosure on tax avoidance through earnings management: Indonesian evidence. *Journal of Contemporary Accounting*, 4(3), 179–192. <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss3art5>
- Nugroho, A. D., Sasangka, L. W. A., & Reskino. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 102–116. <https://doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208>
- OECD. (2024). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. In Harper & Row.
- Rahmawati, S. D., & Masripah. (2022). Monograf Penghindaran Pajak (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Rashid, M. H. U., Begum, F., Hossain, S. Z., & Said, J. (2024). Does CSR affect tax avoidance? Moderating role of political connections in Bangladesh banking sector. *Social Responsibility Journal*, 20(3), 512–530. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2022-0364>
- Rudyanto, A., Julisar, & Debora. (2023). Political connection as a double- edged sword : the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>
- Rudyanto, A., Pirzada, K., & Thio, T. K. (2023). Political connections and tax aggressiveness: The role of ESG performance in Indonesia. *Sustainability*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.3390/su15010055>
- Saleh, M., Amin, H. M. G., & Elamer, A. A. (2025). Corporate Social Responsibility, Tax Behavior, and Institutional Context: An Empirical Analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 6, 7293–7309. <https://doi.org/10.1002/csr.70073>
- Savin, N. E., & White, K. J. (1977). The Durbin-Watson Test for Serial Correlation with Extreme Sample Sizes or Many Regressors. *Econometrica*, 45(8), 1989–1996. <https://doi.org/10.2307/1914122>
- Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2023). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson Education.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh leverage, sales growth, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 872–884. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sipayung, D. P., Simbolon, R. F., & Susanti, M. (2023). Temuan tax avoidance sektor consumer non-cyclical di BEI periode 2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25186>
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Susanto, A., & Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551> dikurangi

- Titisari, K. H. (2020). Up Green CSR (Refleksi Edukatif Riset CSR dalam Pengembangan Bisnis). CV Kekata Group.
- Velte, P. (2023). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(3), 696–731. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2022-0259>
- Velte, P. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) Decoupling and Tax Avoidance : Symbolic Use of Sustainable Boards in the European Union ? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32, 4179–4193. <https://doi.org/10.1002/csr.3172>
- Whetten, D. A. (1989). What Constitutes a Theoretical Contribution? *The Academy of Management Review*, 14(4), 490–495. <https://doi.org/10.2307/258554>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Pres.
- Wulandari, A., & Fanani, Z. (2024). Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax Avoidance (TA) in Indonesia : Moderated Audit Committee Characteristics. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 13(4), 106–117. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.2586>
- Zahriyah, A., & Parmono, A. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.